

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG

ST. NUR RABIAH



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ST. NUR RABIAH
A11115030**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

disusun dan diajukan oleh:

**ST. NUR RABIAH
A11115030**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Juni 2022

Pembimbing I

ACC Untuk
Ujian Skripsi
25/06/2022



**Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D
NIP. 19610806 198903 1 004**

Pembimbing II



**Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.
NIP 19590303 198810 1 001**

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Hasanuddin



**Dr. Sauger Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM
NIP 19690413 199403 1 003**

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

disusun dan diajukan oleh:

**ST. NUR RABIAH
A11115030**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **08 Juli 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., PhD.	Ketua	1..... 
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, MSi., CSF	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., MSi., CWM	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Saiful Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM
NIP 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **ST. NUR RABIAH**
Nomor Pokok : A11115030
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 JULI 2022
Yang Menyatakan



(St. Nur Rabiah)

No. Pokok: A11115030

PRAKATA



Sesungguhnya, segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan dan ampunan kepadaNya, dan kita berlindung kepadaNya dari kejahatan jiwa kita serta keburukan amal perbuatan kita. Tidak lupa penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.” dapat selesai guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar.

Penyelesaian tulisan ini terlepas bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua. Kepada Almarhum Ayahanda Abdul Wahab dan Ibunda St. Halijah tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang selalu di panjatkan pada Allah kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., PhD selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi.
5. Pembimbing skripsi ini: Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., PhD selaku pembimbing I dan Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si selaku pembimbing II. Terima kasih Penulis ucapkan atas ilmu yang diberikan, kesabaran, pengertian dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Dosen penguji skripsi ini: Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA. dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si. Terima kasih atas segala saran dan masukan yang diberikan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, pegawai akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih Peneliti ucapkan atas ilmu yang mereka berikan. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan balasan pahala kepada mereka.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Hasanuddin beserta para stafnya yang telah memfasilitasi buku-buku dan karya-karya ilmiah lainnya sebagai sumber referensi.
9. Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah membantu memberikan informasi data.

10. Edy Retno Setiawan, S.E, Nirwan, dan Sri Wahyuni S.Kom atas kesabaran, nasehat, kasih sayang yang selalu tercurahkan kepada adik bungsu kalian.
11. Om Syukur dan Tante Elly terima kasih atas segala bantuannya.
12. Untuk keluarga besar saya, terima kasih bantuannya selama ini, tanpa kalian penulis bukan siapa-siapa.
13. Lisna Latif, Fitriani sampe S.I.Kom, Sarman S.T, Hasan S.T, Rizal S.H dan teman-teman "DANGKE'15" Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Komisariat Unhas yang telah memberi banyak motivasi.
14. Teman-teman angkatan 2015 (Antares) yang telah bersama-sama mengukir cerita di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin selama masa studi.
15. Teman-teman KKN Gelombang 101, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros (Ani, Novi, Dion, Rifai, kak Asdar, dan Pak Korcam). Terima kasih untuk kerja sama, keseruan, dan pengalaman yang bagi peneliti merupakan memori pelajaran hidup.
16. Kepada Indrawati Sinur dan Deva Afni Cahyani terima kasih atas semuanya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.
17. Kepada Nurul Annisa Nasar yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisannya.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segalanya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan sehingga penulis tak lupa mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih meminimalisir kesalahan dalam skripsi ini.

Makassar, Juli 2022

St. Nur Rabiah

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG

St. Nur Rabiah
Muhammad Yusri Zamhuri
Bakhtiar Mustari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pertanian, sektor pariwisata, pajak daerah dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yaitu uji f (simultan) dan uji t (parsial) dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang, sedangkan sektor pariwisata, pajak daerah dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, sektor pertanian, sektor pariwisata, pajak daerah, dan jumlah kunjungan wisatawan

ABSTRACT

ANALYSIS OF POTENTIAL ORIGINAL INCOME OF ENREKANG REGENCY

St. Nur Rabiah
Muhammad Yusri Zamhuri
Bakhtiar Mustari

This study aims to determine the effect of the agricultural sector, the tourism sector, local taxes and the number of tourist visits on the local revenue of Enrekang Regency. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Enrekang Regency and the Enrekang Regency Regional Revenue Agency. The method used in this are multiple linear regression analysis and hypothesis testing, F-test (simultaneous) and t-test (partial) all is calculater with softwere of SPSS version 22. The results show that the agricultural sector had a negative and significant effect on local revenue in Enrekang Regency, while the tourism sector, local taxes and the number of tourist visits had a positive and significant effect on local revenue in Enrekang Regency.

Keywords: Local revenue, agriculture sector, tourism sector, local tax, and number of tourist visits

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Teoritis	6
2.1.1 Desentralisasi Fiskal	6
2.1.2 Pendapatan Daerah.....	8
2.1.2.1 Definisi Pendapatan Daerah.....	8
2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah	9
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.4 Sektor Pertanian.....	18
2.1.5 Sektor Pariwisata.....	21
2.1.6 Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	24

2.2	Hubungan Antar Variabel	25
2.3	Tinjauan Empiris.....	26
2.4	Kerangka Pikir	29
2.5	Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		32
3.1	Lokasi Penelitian	32
3.2	Jenis dan Sumber Data	32
3.3	Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4	Model Analisis	32
3.5	Uji Hipotesis	33
3.5.1	Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	33
3.5.2	Uji Simultan (Uji F).....	34
3.5.3	Uji Parsial (Uji Statistik t).....	34
3.6	Definisi Operasional Variabel	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Enrekang	37
4.2	Perkembangan Variabel.....	38
4.2.1	Perkembangan Variabel Sektor Pertanian	38
4.2.2	Perkembangan Variabel sektor Pariwisata.....	39
4.2.3	Perkembangan Variabel Pajak Daerah	40
4.2.4	Perkembangan Variabel Jumlah Wisatawan	42
4.2.5	Perkembangan Variabel Pendapatan Asli Daerah	42
4.3	Hasil Analisis Uji Statistik	43
4.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44
4.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	44
4.3.3	Uji t Statistik	45
4.4	Pembahasan	46
4.4.1	Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap PAD Kab. Enrekang	47
4.4.2	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kab. Enrekang.....	48
4.4.3	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD Kab. Enrekang	49
4.4.4	Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap PAD Kab. Enrekang	50
BAB V PENUTUP		52
5.1	Kesimpulan.....	52

5.2	Saran.....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Enrekang.....	37
4.2	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PAD Kab. Enrekang.....	39
4.3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kab. Enrekang.....	40
4.4	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kab. Enrekang.....	41
4.5	Kontribusi Jumlah Wisatawan Terhadap PAD Kab. Enrekang	42
4.6	Perkembangan Variabel PAD Kab, Enrekang	43
4.7	Hasil Estimasi Fungsi Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, Pajak Daerah, dan Jumlah Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
4.1	Diagram Analisis.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Rekap Data Penelitian	60
2	Hasil Olahan Data	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pembangunan merupakan sektor fisik yang sangat penting, khususnya pembangunan daerah, merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat, baik mencakup bidang keuangan maupun faktor strategis pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Agar hubungan tersebut dapat terealisasi, maka pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah. Sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini terhadap suatu daerah sebagai penyedia barang dan jasa public (*public goods / public service*) dan hal ini dikaitkan dengan desentralisasi fiskal artinya sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih 2003).

Pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. Adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan secara optimal karena Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan

fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah berasal dari : a.) Hasil pajak daerah, b.) Hasil retribusi daerah, c.) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d.) Dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD di Kabupaten Enrekang berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan didukung oleh berbagai informasi dari media online mengenai pengelolaan Pendapatan asli daerah Kab. Enrekang yang mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2010 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan secara terus menerus dari Rp. 14.650.195.063.45 – Rp. 99.669.276.952,00, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan Rp. 66.043.333.304,00, tetapi pada tahun berikutnya mengalami kenaikan kembali. berfluktuasinya penapatan asli daerah di kab. Enrekang itu sendiri tidak luput dari peran pemerintahannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, Hal ini membuat ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu pemerintah pusat mengatasinya dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut. Dana perimbangan dari pemerintah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Terjadinya desentralisasi fiskal diharapkan untuk setiap daerah dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat diberikan untuk membantu pemerintah daerah yaitu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun setiap daerah termasuk Kab. Enrekang masih belum tuntas dalam mencapai tujuan-tujuan diadakannya desentralisasi fiskal tersebut. Salah satunya yaitu masih belum tercapainya indikator kinerja daerah dilihat dari peningkatan nilai PAD tiap tahun sehingga diperkirakan bahwa banyaknya transfer dana dari pusat berupa dana perimbangan membuat pemerintah Kab. Enrekang belum mampu meningkatkan ekonomi wilayahnya untuk kualitas daerahnya sendiri menuju lebih baik. Penting

bagi pemerintah Kab. Enrekang untuk mengetahui seberapa pengaruh desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan dengan adanya dana perimbangan berupa DAU, DAK dan DBH sejak tahun 2000 sampai saat ini untuk ekonomi wilayahnya.

Berdasarkan uraian persoalan yang terjadi dalam desentralisasi fiskal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitaian yang berjudul ***“Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”***.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah sektor pertanian berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Enrekang?
2. Apakah sektor pariwisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Enrekang?
3. Apakah jumlah kunjungan wisatawan obyek wisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Enrekang?
4. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sektor pertanian terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang.

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah kunjungan wisatawan obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan judul ini.
- b. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam bangku kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- c. Bagi Pengelola atau Dinas, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak perumus kebijakan atau bagi para pengambil keputusan berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis dibawah ini akan menjelaskan konsep atau teori masing masing variabel dalam penelitian yang bersumber dari beberapa literatur atau penelitian terdahulu.

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi Fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk melaksanakan fungsi atau tugas pemerintahan secara efektif dan mendapat kebebasan pengambilan keputusan dalam penyediaan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih 2003).

Desentralisasi fiskal merupakan faktor yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya faktor Desentralisasi fiskal maka suatu daerah akan memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat (Maryanti, 2013).

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah yang mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009):

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik jika didukung faktor-faktor sebagai berikut (Sidik, 2002). Pertama, adanya peran Pemerintah Pusat yang intensif dalam melakukan pengawasan dan enforcement. Kedua, terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, khususnya dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Ketiga, stabilitas politik yang kondusif. Keempat, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Kelima, desain kebijakan dari keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan daerah. Keenam, kualitas sumberdaya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran yang sebelumnya merupakan Pemerintah Pusat.

2.1.2 Pendapatan Daerah

2.1.2.1 Definisi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan sejumlah dana yang diterima oleh daerah, baik yang berasal dari hasil usahanya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain yang sah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas: Pertama, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain yang sah (misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, atau pun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa. Kedua, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil atau DBH (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi), dana alokasi umum atau DAU yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri, dan dana alokasi khusus atau DAK. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dana hibah, dana

darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan bantuan dari daerah di atasnya atau daerah lain (Anggara S dalam Evi Nilawati, 2019).

2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pada dasarnya metode yang dipakai dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai kesamaan dengan metode yang dipakai menggali sumber-sumber pusat. Penerimaan daerah yang bersumber dari sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Pajak Daerah
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1) Retribusi jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu
 - c. Lain-Lain PAD yang Sah
 - 1) Penerimaan Jasa Giro
 - d. Pendapatan dari Pengembalian
2. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari 3 yaitu sebagai berikut :
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang asli digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Undang-Undang No.33 tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Abdul Halim, 2004).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian sebelumnya PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sehingga analisis pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang penting dalam mencapai sumber-sumber keuangan (Mardiasmo dalam Natalia Rawung, 2016).

2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Ada empat sumber-sumber PAD yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi daerah besar bagi PAD. UU No. 34 tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah kabupaten atau kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten atau kota yang telah ditetapkan.

Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan

perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesejahteraan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- a. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan,
- b. Fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan. Misalnya: pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 adalah:

- a. Jenis pajak Propinsi terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel,
 - 2) Pajak Restoran,
 - 3) Pajak Hiburan,
 - 4) Pajak Reklame,
 - 5) Pajak Penerangan Jalan,

- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- 7) Pajak Parkir.

Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen)
- e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen)
- f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen)
- g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
- h. Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen)
- i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen)
- k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah kepada pembayar atau pemakai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek Retribusi adalah:

a. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah.

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang sah adalah hasil daerah yang di peroleh dari hasil-hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan buka hasil kegiatan dan pelaksaannya tugas juga buka merupakan hasil pelaksanaan kewenangan perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan. Merupakan sumber yang buka dari pajak daerah, bukan hasil retribusi daerah juga buka hasil perusahaan daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Objek LLPADS terdiri atas:

- a. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga deposito;
- d. Tuntutan ganti kerugian Daerah;
- e. Komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah;
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;
- g. Pendapatan denda pajak;
- h. Pendapatan denda retribusi;
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- j. Pendapatan dari pengembalian;
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

- n. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- o. Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- p. Pendapatan badan layanan umum daerah;
- q. Sewa lahan pasar malam perayaan sekaten;
- r. Jaminan bongkar;
- s. Jaminan rusunawa;
- t. Pendapatan bunga pajak;
- u. Pendapatan bunga retribusi;
- v. Pendapatan denda administrasi;
- w. Pendapatan denda hasil operasi yustisi; dan
- x. Pendapatan badan usaha kredit pedesaan.

2.1.4 Sektor Pertanian

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian (Suyatno dalam Ramlawati, 2020).

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, Penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri.

Sektor Pertanian adalah salah satu sektor atau lapangan usaha dimana didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi

suatu bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi dimana didalamnya meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan (Yani, 2015)

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara atau suatu daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

- a) Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
 - b) Kontribusi sektor pertanian terhadap kesempatan kerja,
 - c) Kemampuan sektor pertanian dalam menyediakan keragaman menu makanan yang nantinya sangat mempengaruhi pola konsumsi dan gizi masyarakat,
 - d) Kemampuan sektor pertanian dalam mendukung perkembangan industri hulu dan industri hilir, dan
 - e) Ekspor hasil pertanian akan memberikan sumbangan devisa bagi negara.
- Sektor pertanian merupakan faktor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai kehidupan sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katub pengaman pada krisis ekonomi Indonesia. (Arifin, 2004).

Dampak atau hasil dari kegiatan sektor pertanian di antaranya adalah:

- a) Penghasil pangan dan bahan baku industri

Sektor pertanian sangat berperan dalam ketahanan pangan nasional dan sangat cukup pasokannya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam proses industrialisasi berperan dalam meperoduksi bahan baku bagi industri-industri berbasis pertanian seperti industri minyak kelapa sawit, industri ban otomotif, industri makanan dan lain sebagainya.

b) Pembangunan daerah dan perdesaan

Lebih dari 83 kabupaten atau kota di Indonesia perekonomiannya berbasis pertanian. Adanya pengembangan agroindustri, agroindustri akan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten atau kota, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Sehingga dari jalur pembangunan pertanian inilah di harapkan kesenjangan regional dapat direduksi.

c) Penyangga dalam krisis

Sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal terbukti sangat handal dalam masa krisis ekonomi, bahkan mampu menampung lebih dari 5 juta tenaga kerja limphan dari sektor industri dan jasa yang terkena krisis.

d) Kesempatan kerja, PDB dan devisa

Lebih dari 25,5 juta keluarga atau 100 juta lebih penduduk Indonesia hidupnya bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian mampu menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja di Indonesia; menyumbang 6,9% dari total ekspor non-migas dan memberikan kontribusi sebesar 15% pada PDB nasional.

e) Sosial budaya masyarakat

Usaha pertanian berkaitan erat dengan sosial-budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Sistem sosial yang terbangun dalam masyarakat pertanian telah berperan dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan sosial, seperti adanya “lumbung padi”, “sistem arisan” dikalangan para petani, dan lain sebagainya (Arsyad, 2015)

2.1.5 Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah suatu bidang industri yang dapat menarik seseorang untuk berkunjung ke suatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata karena adanya daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang pariwisata tersebut, serta keseluruhan fenomena alam dan buatan manusia dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan, yaitu memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata (Muchlisin, 2019).

Untuk memperbesar pendapatan asli daerah maka pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata agar sektor pariwisata dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Perkembangan pariwisata dapat berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, salah satu diantaranya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan pemerintah (Bassam dalam Aneldus dan Dewi, 2020).

Ada banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanannya. Beberapa jenis wisata itu adalah sebagai berikut :

a. Wisata Budaya

Wisata ini dimaksudkan dengan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka budaya, dan seni mereka.

b. Wisata Kesehatan

Wisata ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk meninggalkan keadaan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan.

c. Wisata Olahraga

Wisata ini dimaksudkan dengan wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau menghadiri pesta olahraga di suatu tempat atau suatu negara.

d. Wisata Komersial

Dimaksudkan dalam wisata komersial ini adalah mengunjungi pameran- pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya.

e. Wisata Politik

Jenis wisata ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian dalam peristiwa kegiatan politik.

f. Wisata sosial

Wisata ini merupakan pengorganisasian suatu perjalanan yang murah dan mudah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan.

g. Wisata Pertanian

Wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek- proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya dimana wisatawan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun untuk sekedar menikmati aneka macam tanaman.

h. Wisata maritim (bahari)

Jenis wisata ini biasanya dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, danau, pantai, teluk, dan laut.

i. Wisata Cagar Alam

Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang ditemukan di tempat lain.

Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pariwisata.

- g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata.
- h. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

2.1.6 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat (Pitana & Diarta dalam Suastika & Yasa, 2017).

Jumlah kunjungan wisatawan akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat local yang dikelompokkan menjadi delapan kelompok besar, yaitu (1) dampak terhadap penerimaan devisa, (2) dampak terhadap pendapatan masyarakat, (3) dampak terhadap kesempatan kerja, (4) dampak terhadap harga-harga, (5) dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan, (6) dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, (7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya, (8) dampak terhadap pemerintah daerah (Cohen dalam Suastika & Yasa, 2017)

Wisatawan yang berkunjung diluar daerah telah disediakan hotel, losmen, penginapan untuk pengunjung yang ingin menginap. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap /

beristirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama. Dengan adanya seperti itu diharapkan dapat meningkatkan tingkat hunian hotel sehingga dapat meningkatkan pendapatan sektor pariwisata.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Adapun hubungan antar variabel yang dijelaskan pada teori atau konsep dibawah ini:

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sektor lainnya karena sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian, hal ini akan berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pertanian bukan dari pajak daerah, retribusi daerah maupun laba perusahaan daerah tetapi kontribusinya berasal dari dinas pertanian, semua penerimaan hasil pertanian akan menjadi hak milik Departemen Pertanian kemudian penerimaan secara keseluruhan akan masuk ke Penerimaan Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pendapatan asli daerah dapat di peroleh dari berbagai sektor usaha besar seperti, sektor pertanian, sektor jasa, sektor perdagangan, sektor industry dan lain-lainnya ,dan sektor pariwisata dapat di kategorikan sebagai sumber pendapatan pada beberapa sector yang secara langsung dapat memberikan pemasukan pada penerimaan PAD (Ahmar, Nurlinda, Dan Mustafa 2012). Sektor Pariwisata merupakan industri yang tidak mengeluarkan asap yang dapat menciptakan kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pertumbuhan ekonomi dan juga pencipta lapangan kerja yang relatif besar mengurangi tingkat kemiskinan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling besar yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin banyak penduduk suatu daerah, maka pajak daerah juga akan semakin besar. Daerah yang memiliki pendapatan pajak yang tinggi dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakatnya tidak akan bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat lagi (Ardiyanto, 2018)

Jumlah wisatawan, Wisatawan menurut Undang-Undang 10 tahun 2009 adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata. Sedangkan untuk jumlah wisatawan adalah banyaknya wisatawan yang diukur berdasarkan kuantitas Untuk jenis wisatawan dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan dari mana datang atau asal Negara, meliputi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, ketika wisatawan meningkat dan pihak swasta serta pemerintah sebagai pihak yang mengelolah lalu merespon positif terhadap sektor pariwisata dengan melakukan pembenahan (Sarta Kapang, dkk 2019).

2.3 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian sehingga mempermudah dalam pemahaman untuk melakukan penelitian atas dasar memperkaya pengetahuan dari peneliti sebelumnya. Berikut hasil peneliti terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Beatrik Okta Dwita (2017) menulis tentang "Pengaruh Sektor Pertanian Dan Industri Pengolahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Periode 2009-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sektor pertanian dan sektor industri pengolahan terhadap PAD di kabupaten Pringsewu tahun 2010-2016 dan mendeskripsikan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap PAD di kabupten pringsewu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan pendapatan asli daerah kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD dikarenakan hasil pendapatan dari sektor pertanian belum cukup untuk dialokasikan pada PAD dalam hal ini sektor pertanian lebih cenderung pada pada pengurangan pengangguran dan pemenuhan kebutuhan petani sehari-hari, sektor industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dalam hal ini disebabkan karena kegiatan industri seperti industri makanan, industri kain perca, dan idustri kerajinan lainnya sudah dikenakan pajak dalam usahanya sehingga alokasi pajak pada daerah akan meningkatkan pendapatan di kabupaten Pringsewu.

Penelitian yang dilakukan oleh Jefri Tri Aprilianto, dan Dr. Susilo, SE., MS (2016) menulis Tentang "Analisis Peran Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. variabel yang digunakan penelitian ini yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, kurs USD, dan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Jawa

Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sektor pariwisata pada Kabupaten dan Kota memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji statistik pada tingkat kepercayaan sebesar 95% semua variabel independen yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan kurs USD secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan secara parsial hanya variabel jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan kurs USD yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

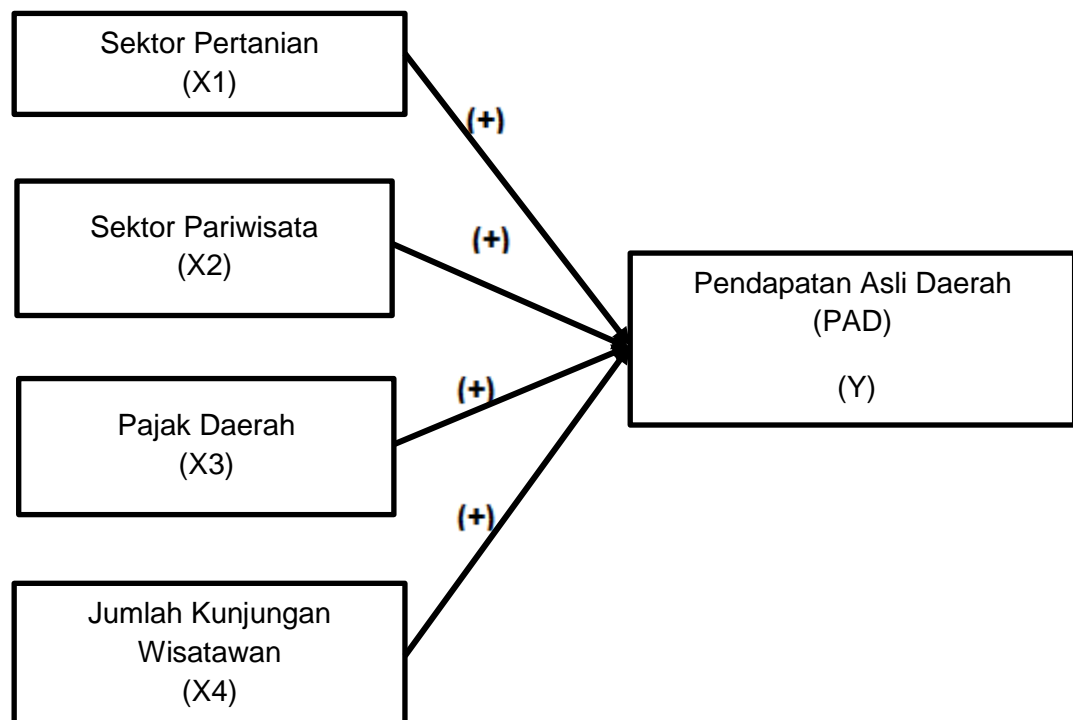
Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyan Natoen, Evada Dewata, Yuliana Sari, Susi Ardiani, dan Karina Leonasari (2018) menulis tentang "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan". Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara parsial dan simultan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, hasil penelitian secara simultan atau bersamasama menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Yoga Suastika dan I Nyoman Mahaendra Yasa (2015), yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Bali, dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan lama tinggal wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatana asli daerah sebagai variabel mediasi hubungan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran yang akan menjelaskan tentang pengaruh variabel- variabel terkait dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Bersarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini melihat pengaruh variabel sektor pertanian, sektor pariwisata, pajak daerah, dan jumlah kunjungan wisatawan sebagai variabel independen (X) yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependennya (Y).

2.5 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2. Diduga bahwa sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
3. Diduga bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
4. Diduga bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.